

Daftar transaksi afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan dapat dilihat dalam Catatan 31 tentang Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2024.

Berdasarkan *review*, Direksi Perseroan menyatakan bahwa seluruh transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta sesuai dengan ketentuan POJK No.42/2020 dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan, melalui Komite Audit, juga telah melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi telah dilaksanakan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*). Seluruh transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan pada tahun 2024 dilakukan secara wajar (*at arm's length*) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal.

The list of affiliated transactions which are business activities carried out to generate revenue and which are conducted regularly, repeatedly, and/or continuously can be seen in Note 31 regarding Nature of Relationship and Transactions with Related Parties in the Company's 2024 Consolidated Financial Statements.

Based on the review, the Company's Board of Directors stated that all affiliated transactions and/or conflicts of interest have gone through adequate procedures to ensure that these transactions have been carried out per generally accepted business practices and per the provisions of POJK No.42/2020 and the Company's Good Corporate Governance Code.

The Company's Board of Commissioners, through the Audit Committee, has also carried out adequate procedures to ensure that affiliated transactions have been carried out in compliance with the arm's length principle. All affiliated transactions and/or conflicts of interest in 2024 were carried out fairly (at arm's length) and under normal commercial requirements.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perseroan Pada Tahun Buku Terakhir

CHANGES IN LEGAL REGULATIONS AGAINST THE COMPANY IN THE LAST FISCAL YEAR

Sepanjang 2024, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh regulator yang berdampak pada Perseroan, antara lain:

Throughout 2024, there are a several of laws and regulations ordered by regulators that have an impact for the Company, including:

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Amendments to Laws and Regulations	Penjelasan Explanation	Pengaruh Terhadap Perseroan Impact on the Company
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection	Undang-undang ini resmi berlaku pada tahun 2024 setelah melalui masa transisi 2 tahun sejak diundangkan, yang bertujuan untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.	Perseroan selaku pengendali dan prosesor data pribadi perlu melakukan kendali atas aktivitas pemrosesan data pribadi yang meliputi (i) perolehan dan pengumpulan data pribadi, (ii) penyimpanan data pribadi, (iii) penggunaan data pribadi, (iv) perbaikan dan pembaruan data pribadi, (v) penampilan,

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Amendments to Laws and Regulations	Penjelasan Explanation	Pengaruh Terhadap Perseroan Impact on the Company
	Undang-undang ini mengatur antara lain mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara; larangan dalam penggunaan data pribadi; dan ketentuan pidana terkait perlindungan data pribadi. This law officially came into effect in 2024 following a two-year transition period since its enactment. It aims to protect personal data in the process of personal data processing to ensure the constitutional rights of personal data subjects. This law regulates, among other things, principles; types of personal data; the rights of personal data subjects; personal data processing; obligations of personal data controllers and processors in processing personal data; personal data transfer; administrative sanctions; institutional arrangements; international cooperation; public participation; dispute resolution and procedural law; prohibitions on the use of personal data; and criminal provisions related to personal data protection.	pengumuman, transfer, penyebaran, atau pengungkapan data pribadi, dan/atau (vi) penghapusan atau pemusnahan data pribadi. The Company as controllers and processors of personal data, are required to oversee personal data processing activities, which include: (i) obtaining and collecting personal data, (ii) storing personal data, (iii) using personal data, (iv) correcting and updating personal data, (v) displaying, announcing, transferring, disseminating, or disclosing personal data, and/or (vi) deleting or destroying personal data
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions.	Undang-undang ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun perubahan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi transaksi elektronik, kontrak elektronik internasional, dan perlindungan anak sebagai pengguna sistem elektronik. This law constitutes the second amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. The changes regulated in this law include electronic transactions, international electronic contracts, and child protection as users of electronic systems.	Dalam hal Perseroan melakukan Kontrak Elektronik internasional, maka dapat diberlakukan hukum Indonesia dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. If the Company engages in an international Electronic Contract, Indonesian law may be applied, considering the provisions stipulated in this law.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Semen Secara Wajib. Minister of Industry Regulation Number 26 of 2024 concerning Mandatory Implementation of Indonesian National Standards for Cement.	Ketentuan ini mengatur kewajiban bagi produsen semen untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi SNI, guna menjamin kualitas dan keamanan produk semen yang beredar di pasar Indonesia, serta mendukung pengembangan industri semen nasional yang berdaya saing. This provision regulates the obligation for cement producers to ensure that the products produced comply with SNI, to guarantee the quality and safety of cement products circulating in the Indonesian market, as well as support the development of a competitive national cement industry.	Perseroan wajib menyesuaikan nomor SNI untuk produk semen yang diproduksi, berdasarkan Peraturan ini. The Company was required to adjust the SNI number for the cement products they produce, based on this Regulation.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Amendments to Laws and Regulations	Penjelasan Explanation	Pengaruh Terhadap Perseroan Impact on the Company
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Government Regulation Number 25 of 2024 concerning the Amendment to Government Regulation Number 96 of 2021 on the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities.	Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain pengertian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), jangka waktu perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) milik anak perusahaan BUMN, kriteria kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam dan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara. This regulation amends several provisions in Government Regulation Number 96 of 2021 on the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities, including the definition of the Work Plan and Budget (RKAB), the extension period for Mining Business Licenses (IUP) or Special Mining Business Licenses (IUPK) owned by state-owned enterprise subsidiaries, criteria for production operation activities integrated with facilities for processing and/or refining metallic minerals, and the development and/or utilization of coal.	Sehubungan dengan jangka waktu perpanjangan IUP atau IUPK yang dimiliki Perseroan atau anak perusahaan, jangka waktu kegiatan operasi produksi dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan. In relation to the extension period for IUP or IUPK held by the Company or its subsidiary, the production operation activities may be granted an extension of 10 (ten) years for each extension.
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-275/MBU/11/2024 Tahun 2024 tentang Prioritas Penerapan Keamanan Siber di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Decree of the Minister of State-owned Enterprises Number SK-275/MBU/11/2024 of 2024 concerning Priorities for the Implementation of Cyber Security within State-owned Enterprises.	Keputusan ini menetapkan 15 kontrol terkait keamanan siber yang meliputi proses identifikasi, proteksi, deteksi, respon, dan pemulihan, untuk meminimalisasi serangan siber di lingkungan BUMN. This decision establishes 15 cybersecurity controls covering the processes of identification, protection, detection, response, and recovery, to minimize cyberattacks in the State-owned Enterprises (BUMN) environment.	Perseroan perlu mengimplementasikan 15 kontrol terkait keamanan siber, melakukan penilaian risiko atas kontrol yang tidak dapat dilakukan, menggunakan <i>tools</i> pendukung, berkolaborasi antar BUMN maupun dengan Forum Digital BUMN, dan melaporkan secara berkala kepada Kementerian BUMN pada laporan tahunan Perseroan. The Company needs to implement 15 cybersecurity controls, conduct risk assessments for controls that cannot be implemented, use supporting tools, collaborate between State-owned Enterprises (BUMN) and with the BUMN Digital Forum, and report periodically to the Ministry of State-owned Enterprises in the company's annual report.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 45 of 2024 on the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies.	POJK ini mengatur mengenai jangka waktu efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kewajiban pencatatan dan pendaftaran efek bersifat ekuitas, perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan tertutup, kewajiban penyampaian laporan informasi dan fakta material serta kedudukan pemegang saham publik dalam likuidasi emiten atau perusahaan publik. This POJK regulates the effective period of the Registration Statement, the obligation to list and register equity securities, the change of status from a public company to a private company, the obligation to submit reports on material information and facts, and the position of public shareholders in the liquidation of issuers or public companies.	Perseroan wajib menyampaikan Informasi atau Fakta Material kepada OJK dan melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat sesegera mungkin pada saat Perseroan mengetahui atau selanjutnya mengetahui Informasi atau Fakta Material dan paling lambat sebelum dimulainya sesi I waktu perdagangan di Bursa Efek pada hari kerja berikutnya. The Company is required to submit Material Information or Facts to the OJK and announce them to the public as soon as possible upon becoming aware or reasonably expected to be aware of such Material Information or Facts, and no later than before the start of the first trading session on the Stock Exchange on the next business day.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY

Dalam periode berjalan, Grup telah menerapkan standar baru dan sejumlah amendemen/penyesuaian baru PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 di antaranya:

PSAK 107 (dahulu PSAK 60) (amendemen) Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

PSAK 116 (dahulu PSAK 73) (amendemen) Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik.

PSAK 201 (dahulu PSAK 1) (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.

PSAK 207 (dahulu PSAK 2) (amendemen) Laporan Arus Kas.

Penerapan atas PSAK baru dan amendemen/penyesuaian PSAK tersebut tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Penjelasan secara lengkap, dapat mengacu pada Catatan Laporan Keuangan Konsolidasian nomor 2.

In the current period, the Group has applied new standards and amendments/improvements to SFAS that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after 1 January 2024, including:

SFAS 107 (previously SFAS 60) (amendment) of Financial Instruments: Disclosure.

SFAS 116 (previously SFAS 73) (amendment) Lease liabilities in Sale and Leaseback.

SFAS 201 (previously SFAS 1) (amendment) Presentation of Financial Statements: Non-current liabilities with covenants.

SFAS 207 (previously SFAS 2) (amendment) Cash Flows Statements.

The adoption of these new SFAS standards and amendments/improvements to SFAS does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current period or prior years.

Detailed explanation refers to Notes to Consolidated Financial Statement no. 2.

Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi

EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Tidak terdapat kejadian luar biasa dan jarang terjadi yang dialami Perseroan pada tahun 2024 yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Perseroan.

There were no extraordinary and rare events experienced by the Company in 2024 that significantly affected the Company's performance.